

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di kota Yogyakarta dapat dikatakan cukup baik. Dari segi proses, implementasi kebijakan Pemerintah Kota tentang pengelolaan air limbah domestik sudah berjalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 6 Tahun 2009. Dari segi hasil jangka pendek yang dapat dirasakan bahwa implementasi kebijakan Pemerintah Kota tentang pengelolaan air limbah domestik sudah mengarah pada tujuan kebijakan, yaitu agar terkendalinya pembuangan air limbah domestik, terlindunginya kualitas air tanah dan air permukaan, serta meningkatnya upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Meskipun demikian masih banyak pelanggaran-pelanggaran terkait dengan pengelolaan air limbah yang luput dari pengawasan Dinas Kimpraswil sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pelaksana Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik tersebut. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Kota Yogyakarta, agar dalam pengelolaan air limbah domestik dapat berjalan lebih baik lagi.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Yogyakarta antara lain meliputi faktor kejelasan standar dan sasaran kebijakan adalah terkendalinya pembuangan air limbah agar kualitas air tanah dan air permukaan Kota Yogyakarta dapat terlindungi. Komunikasi, koordinasi masing-masing instansi terkait belum terjalin dengan baik, sedangkan komunikasi antara Dinas Kimpraswil dengan masyarakat sudah terjalin cukup baik. Sumberdaya terdiri dari sumber daya manusia, dimana ketersediaan personil khusus pembersih masih kurang memenuhi kebutuhan masyarakat, sumber daya finansial, yang dimaksud adalah dana OP (Operasional dan Pemeliharaan) dan pengembangan jaringan, dalam hal ini Dinas Kimpraswil mendapat dana dari pemerintah Kota Yogyakarta, Direktorat Jenderal Cipta Karya DIY, dan Pemerintah Aus Aid Australia. Disposisi, komitmen para implementor cukup baik, hal ini bisa dilihat dari peran pemerintah sebagai pelayanan Infrastruktur dan pelayanan keluhan masyarakat.

B. Saran

Implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik secara resmi memang baru berjalan selama dua setengah tahun, namun berdasarkan penelitian kebijakan ini dapat diimplementasikan dan memperoleh hasil yang cukup baik. Maka dari itu

diperlukan suatu kerjasama yang baik dari berbagai pihak dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga pencapaian hasil kebijakan di masa yang akan datang lebih optimal. Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan antara lain:

1. Pemerintah harus lebih aktif dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik kepada semua pihak, terutama pihak masyarakat kota Yogyakarta, sehingga pemahaman masyarakat terhadap Pengelolaan Air Limbah Domestik menjadi lebih baik. Dengan pemahaman yang baik dari masyarakat, diharapkan pengelolaan air limbah domestik dapat terlaksana dengan lebih baik lagi.
2. Pemerintah sebaiknya lebih optimal dalam upaya menyediakan sumber daya penunjang implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di kota Yogyakarta baik sarana dan prasarana, biaya, serta ketersediaan personil khusus pembersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
3. Pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan komitmen terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di kota Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Leo Agustino.(2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Haedar Akib dan Antonius Tarigan. (2008). “*Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan : Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya*”. Jurnal. Dikutip dari rudisalam.files.wordpress.com/.../artikulasi-konsep-implementasi-kebijakan-jurnal-baca-agustus-20081.doc. pada 25 Maret 2011.
- Suharsimi Arikunto. (1999). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azrul Azwar. (1986). Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya.
- Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin Burhan. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Raja Grafindo.
- Latifa Hanum Daulay. (2008). *Evaluasi Kebijakan Departemen Pendidikan Nasional Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (Studi Pada Program SMK Kecil di SMP wilayah Sumatera Utara)*. Skripsi.Universitas Negeri Sumatera Utara.
- Davey, KJ. (1988). Pembiayaan Pemerintah Daerah : Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga. Jakarta: UI-Press.
- Hindarko, S. (2003). Mengolah Air Limbah Supaya Tidak Mencemari Orang Lain. Jakarta: ESHA .
- M.Irfan Islamy. (2009). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta :Bumi Aksara.
- Kodoatie, Robert dan Sjarief, Roestam. (2005). *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*. Yogyakarta: Andi.
- Koesnadi Hardjasoemantri. (2000). *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Ramly K.T. Kusumo (2008). *Kajian Dampak Kebijakan Publik Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor*.Tesis. Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta

- Lexy J. Moleong. (1998). *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- (2006). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung :PT Remaja Rosdakarya.
- Muhsinatun Siasah Masruri, dkk. (2002). Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Yogyakarta: UPT MKU UNY.
- Hadari Nawawi. (2002).*Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wahyu Nurharjadmo. (2008). *Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Sistem Ganda di Sekolah Kejuruan*. Jurnal Spririt Publik Volume 4, Nomor 2 Halaman 215-228.
- Paskarina, Caroline.dkk. (2007). *Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Pasar di Kota Bandung*. Laporan Penelitian.Bandung : Pusat Penelitian Kebijakan Publik dan Pengembangan Wilayah. Universitas Padjadjaran.
- Sanafiah Faisal. (2000). *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang : YA3 Malang.
- Sugiharto. (1987). *Dasar-dasar Pengelolaan Air Limbah*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno. (2010). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses & Analisis Kebijakan*. Yogyakarta : UNY Press.
- Siswanto Sunarno. (2008). *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suriakusumah, dkk. (2008). *Buku Ajar Sistem Pemerintahan Daerah*. Bandung : Laboratorium PKN-FPIS.
- Susilawaty, Susy. (2007). *Analisis Kebijakan Publik Bidang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Kota Tasikmalaya*. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Miftah Thoha. (2008). *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media Group.

- Thoriq, Mohammad. (2005). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik Pada Prona Swadaya Di Kabupaten Semarang*.Tesis.Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Solichin Abdul Wahab. (2008). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*.Malang : Universitas Muhamadiyah Malang.
- Sadu Wasistiono. (2003). *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung: CV Fokusmedia.
- Wijaya, HAW. (2002). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Budi Winarno. (2007). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- JICA, 2003. Draft Akademis Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Limbah, <http://www.jala-limbah.or.id/>.
- Hilman, Masnellyharti. 2004. “Pengelolaan Limbah Rumah Tangga (B3 cair dan padat)”. Makalah Diklat Kemampuan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah. Kementerian Lingkungan Hidup. Tanggal 12-16 Juli 2004.
- Rahardyan, Benno dan Adrianta Sri Widagdo. 2005. “Peningkatan Pengelolaan Persampahan Melalui Pengembangan Daur Ulang”. Makalah disampaikan dalam Lokakarya 2, Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah di Indonesia, Jakarta. 30 Juni – 1 Juli 2005.
- Departemen PU, 2007. Kriteria Teknis Prasarana dan Sarana Pengelolaan Air Limbah. Prosiding Diseminasi dan Sosialisasi NSPM Bidan PLP dan Penyusunan PJM, Mataram 29-30 November 2007.
- Tim PPSML PPs-UI. (2009). Pelantikan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terpadu (online). Tersedia: http://asia.groups.yahoo.com/group/wwt_ipal/778. (2 april 2009).
- UU. No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup.
- UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- UU. No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

PP. No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2009 tentang pengelolaan air limbah domestik.

[Http://www.jogjakota.go.id/index/extr.detail/21](http://www.jogjakota.go.id/index/extr.detail/21) diakses tanggal 9 april 2012.

Media Indonesia.com diunduh 2 desember 2011.

KRJogja. com diunduh 19 Januari 2012.